

**IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI AKADEMIK (SIKAD)
OLEH BIRO AKADEMIK IPDN KAMPUS JATINANGOR**

Serly Wulandari & Mubarak R. Adam

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

serlywulandari.sw@gmail.com

ABSTRACT

One of the functions of government is service. Of function the government presence in providing services to the community is very important included in the education services. In progress age also advanced will communication and information technology and communities more critical, education services felt by those Akademika to the institutions IPDN stillare convoluted and less effective, so we needed breakthrough so as to produce an easy service, quickly and correctly. These services occurred in combine education services into information technology and communication that in IPDN is referred to a System Information Academic (SIKAD).

This research using methods descriptive with a qualitative approach. The operationalization of the concept of this research using the theory of the Implementation Of Policy Edwards III as to dimensions among other: communication, resources, disposition, as well as the structure of bureaucracy. Data sources in the form of person, place and paper. Data collection techniques through interviews, observation and review of documentation. Informants this research is by those Akademika and Praja IPDN. Covers data relating to analysis techniques strategy using analysis SWOT.

The research results show that of Policy SIKAD in increase education service in academic bureau Campus IPDN Jatinangor not yet optimal. Factors barrier in terms of 4 dimensions, namely communication, resources, disposition and bureaucratic structure which are affected by a number of factors, namely the application of SIKAD have not user friendly, have not up to-date and integrated data, the socialization is not give to all those akademika, has not done enough resources and the lack of coordination and cooperation between different branches of the related SIKAD. Strategy that can be performed leaders to step up their commitment, function to optimize the use of the employees, make the mapping of infrastructure needs and the needs of the employees who are experts in the field of IT, improve the delivery of compensation, increase the competency executives and utilization SIKAD as well as making special regulation about SIKAD.

Keywords: *the implementation of policy, SIKAD, education services*

PENDAHULUAN

Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan

tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia¹. Hal tersebut menunjukkan

¹ L.P. Sinambela, *Ilmu dan Budaya, Perkembangan Ilmu Administrasi Negara*, Edisi Desember 1992, hlm. 198

bahwa setiap orang/masyarakat cenderung dan bahkan membutuhkan pelayanan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu pelayanan publik yang diselenggarakan oleh organisasi privat maupun pelayanan publik yang diselenggarakan oleh organisasi publik.

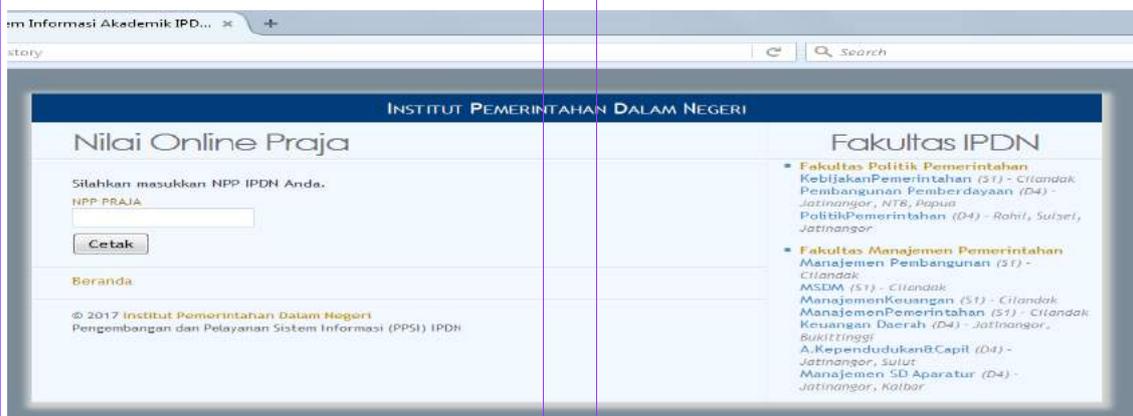
Mengingat kemajuan zaman yang semakin berkembang, tuntutan akan efektivitas dan efisiensi pelayanan yang diberikan semakin gencar. Apalagi dengan telah berkembangnya berbagai terobosan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam kehidupan sehari-hari yang dimanfaatkan tidak hanya pada organisasi sektor bisnis tetapi juga pada sektor publik seperti perguruan tinggi.

Bagi lembaga perguruan tinggi, teknologi informasi yang dipakai dalam sistem informasi menjadi suatu kebutuhan untuk menunjang proses pendidikan. Terutama dalam hal meningkatkan efisiensi dan produktivitas bagi manajemen pendidikan di perguruan tinggi. Sehingga lahirlah Sistem informasi yang biasa disebut dengan Sistem Informasi Akademik dan telah dimanfaatkan oleh salah satu perguruan tinggi bernama

Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

Sistem Informasi Akademik (SIKAD) mulai dikembangkan sejak tahun 2012 berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 555.4-175 Tahun 2012 tentang Tim Pengelola *Website*, Sistem Informasi Akademik (SIKAD) dan *Paperless Office* (PLO) IPDN Tahun 2012 oleh Unit Pelayanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (UPTIK) dengan menggunakan alamat *website* siakad.ipdn.ac.id. SIKAD mulai digunakan oleh Civitas Akademika sejak dikeluarkannya Peraturan Rektor IPDN Nomor 01 Tahun 2014 tentang Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan IPDN. Dengan adanya Sistem Informasi Akademik semua Civitas Akademika terutama Praja dapat mendaftar sendiri pada sistem, mendownload tutorial, melihat Kalender Akademik, Jadwal Pengajaran, Jadwal Pelatihan, Jadwal Pengasuhan maupun Nilai Online.

Melalui Nilai Online, Praja dari Tingkat I sampai IV dapat melihat nilai Per Semester dan mengambil KHS (Kartu Hasil Studi) secara langsung dengan



Gambar 1
Tampilan Masuk Nilai Online

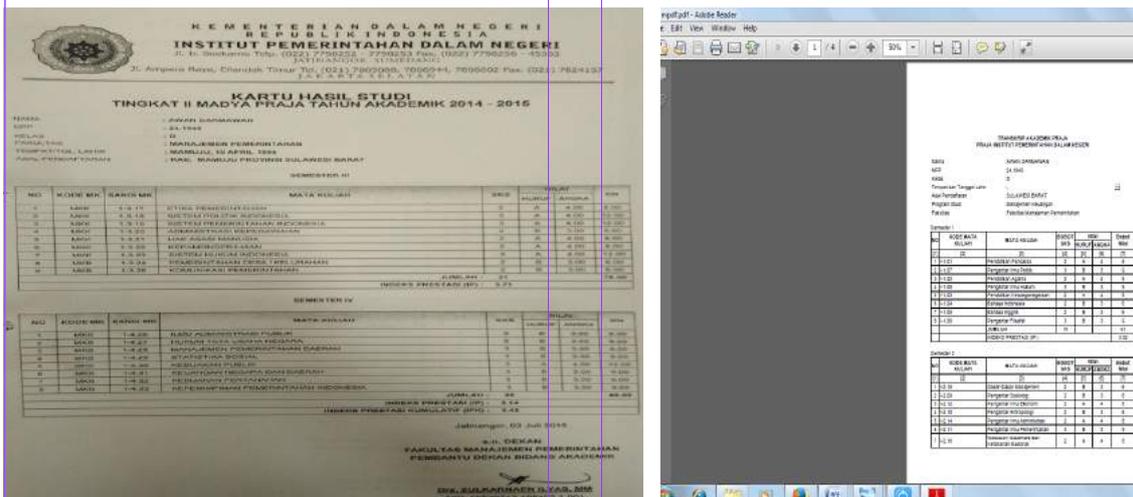
Sumber: siakad.ipdn.ac.id tahun 2017

memasukkan NPP (Nilai Pokok Praja), kemudian mencetaknya pada selembar kertas. Namun dalam prakteknya, pengambilan KHS yang seharusnya dapat dilakukan dari mana pun dan kapan pun, masih saja dibagikan secara manual kepada masing-masing Praja di Ruang Tata Usaha (TU) Fakultas Manajemen Pemerintahan. Praja akan datang secara rombongan Per Kelas, sehingga ruang Tata Usaha menjadi ribut dan penuh keramaian. Hal tersebut dapat diketahui berdasarkan hasil pra riset yang dilakukan penulis dengan mewawancarai 5 orang Praja. Adapun tampilan Masuk Nilai Online dapat dilihat pada gambar 1 di muka.

Di sisi lain, masih adanya perbedaan Kartu Hasil Studi (KHS) yang dibagikan secara manual dengan yang terdapat dalam SIAKAD. Hal demikian dapat dilihat pada gambar 2 dimana KHS hasil pembagian secara manual memiliki Kop IPDN, Judul Kartu Hasil Studi sesuai Tingkatan dan Tahun Akademik, biodata Praja terisi lengkap serta dibubuhi tanda tangan pejabat yang berwenang. Sedangkan KHS

dalam SIAKAD tidak memiliki KOP, Judul Transkrip Akademik Praja IPDN, biodata tempat tanggal lahir Praja belum terisi serta tidak dibubuhi tanda tangan. Sehingga walaupun Praja mencetak secara langsung KHS dari SIAKAD, legalitasnya akan dipertanyakan dengan tidak adanya tanda tangan pejabat berwenang.

Nilai Online yang di input oleh Admin penginput nilai memerlukan jaringan internet yang stabil. Kondisi demikian diperlukan untuk mempermudah dan mempercepat input nilai yang dilakukan. Namun dalam keseharian jaringan internet masih sering bermasalah, sehingga sulit untuk membuka dan masuk ke SIAKAD. Disamping itu, berdasarkan hasil pra riset yang dilakukan penulis dengan mewawancarai 3 orang admin penginput nilai dapat diketahui bahwa masih sering terjadi *error system* (sistem eror) pada SIAKAD. Dimana ketika proses input nilai sedang berlangsung dan tinggal menunggu tersimpannya data, tetapi justru data tidak tersimpan dan setelah dilakukan input berulang kali baru dapat tersimpan.



Gambar 2

KHS Hasil Pembagian Manual dan KHS dari SIAKAD

Sumber: Pemegang Nilai Per Angkatan di Fakultas Manajemen Pemerintahan



Gambar 3
Tampilan Laporan Nilai Pengajaran Per Kelas Per Semester

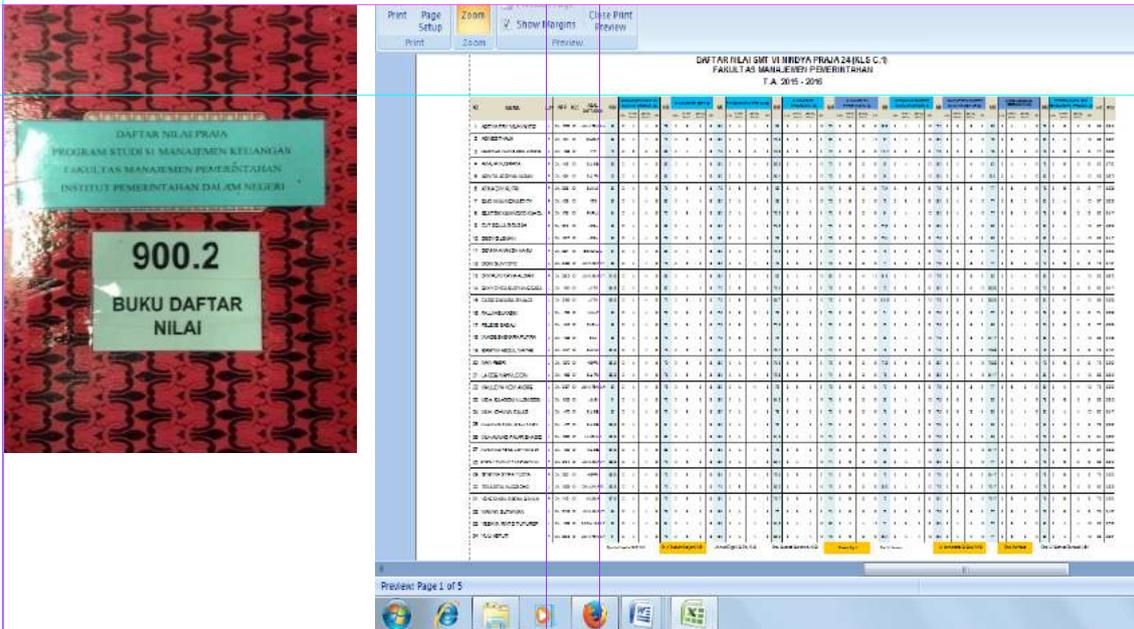
Sumber: siakad.ipdn.ac.id tahun 2017

Nilai online merupakan nilai per mata kuliah dalam tiap semester. Nilai di input sesuai nama Praja per kelas dan mata kuliah dalam tiap semesternya (lihat gambar 3). Input nilai akan terasa sulit bagi admin apabila terjadi perpindahan Praja dari Kampus Jatinangor ke Kampus Daerah atau sebaliknya secara tiba-tiba. Hal demikian akan memengaruhi nama serta jumlah siswa dalam kelas yang telah dibuat sebelumnya. Sehingga akan berdampak pada kosongnya nilai Praja yang memiliki kelas dan Kampus berbeda sebelumnya.

Nilai yang diinput merupakan data hasil rekapan oleh pemegang nilai tiap angkatan di Fakultas Manajemen Pemerintahan. Secara teknis, nilai yang diberikan oleh Dosen akan terlebih dahulu dicatat pada buku besar, kemudian dimasukkan ke dalam Microsoft Excel dan selanjutnya buku besar akan dipinjam oleh admin untuk menginput nilai sesuai kelas per semester (lihat gambar 4).

Hal demikian menimbulkan rangkap pekerjaan karena terjadi pekerjaan yang sama berulang-ulang sehingga menjadi tidak efektif. Ditambah lagi dengan sering terlambatnya nilai dari beberapa Dosen, dimana berdasarkan hasil wawancara penulis dengan 3 orang admin penginput nilai dapat diketahui bahwa dari 145 dosen di Fakultas Manajemen Pemerintahan terdapat 19 orang Dosen yang terlambat dalam mengumpulkan nilai atau sebesar 13%. Keterlambatan nilai tersebut akan berpengaruh dalam penginputan nilai dimana admin akan menunggu kelengkapan nilai, baru kemudian menginputnya secara bersamaan.

Penginputan nilai per semester dalam seluruh mata kuliah secara bersamaan, berpotensi menimbulkan kesalahan dalam proses input. Sehingga dapat terjadi kesalahan nilai yang disebabkan faktor *human error* oleh admin bersangkutan.



Gambar 4
Buku Besar Nilai Per Semester dan Rekap Nilai dalam Microsoft Excel

Sumber: Pemegang Nilai Per Angkatan di Fakultas Manajemen Pemerintahan

RUMUSAN MASALAH

Peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimanakah implementasi kebijakan Sistem Informasi Akademik (SIAKAD) dalam meningkatkan pelayanan pendidikan pada Biro Akademik kampus IPDN Jatinangor?
2. Apa saja faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan Sistem Informasi Akademik (SIAKAD) dalam meningkatkan pelayanan pendidikan pada Biro Akademik kampus IPDN Jatinangor?
3. Bagaimana strategi yang sebaiknya dilakukan oleh Biro Akademik kampus IPDN Jatinangor dalam menerapkan kebijakan Sistem Informasi Akademik (SIAKAD)?

LANDASAN TEORI

Pelayanan Publik

Pelayanan publik diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan². Dengan demikian, pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara. Negara didirikan oleh publik (masyarakat) tentu saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam penelitian ini, teori pelayanan publik digunakan sebagai konsep

² Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik* (Yogyakarta: Pembaruan, 2005), hlm. 1-2

pelayanan pendidikan yang dilakukan oleh Biro Akademik IPDN Kampus Jatinangor. Dimana dalam hal ini negara/pemerintah diibaratkan sebagai Lembaga IPDN dan masyarakat/rakyat dalam hal ini adalah civitas akademika IPDN Kampus Jatinangor.

Implementasi Kebijakan

Istilah kebijakan (*policy*) sudah begitu populer dan tidak asing lagi didengar. Makna *policy* yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris diartikan banyak ahli dengan beraneka ragam penjabaran berdasarkan perspektifnya masing-masing. Namun pada umumnya kata *policy* tersebut diartikan sebagai suatu kebijakan.

Dalam merealisasikan suatu konsep kebijakan diperlukan adanya suatu implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahap dari proses kebijakan publik yang sangat penting sebagaimana yang dikatakan oleh Edwards III bahwa, “*without effective implementation the decisions of policymakers will not be carried out successfully*”³ (tanpa implementasi yang efektif keputusan dari para pembuat kebijakan tidak akan dapat sukses dilaksanakan). Lebih lanjut, Edwards menamakan model implementasi kebijakannya dengan *Direct and Indirect Impact on Implementation* sebagaimana berikut.

Dalam pendekatan yang diteoremakan oleh Edwards III, terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu:

3 Muhammad Reza Prabowo, *Implementasi Kebijakan Penanganan Penyandang Disabilitas di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah* (Jakarta: IPDN, 2013), hlm.26

- 1) Komunikasi

Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai atau digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut, yaitu:

 - a) Transmisi

Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula.
 - b) Kejelasan

Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan (*street-level-bureuacrats*) harus jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua).
 - c) Konsistensi

Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau dijalankan).
- 2) Sumber daya

Indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

 - a) Staf

Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya.
 - b) Informasi

Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Kedua informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana

<p>terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.</p> <p>c) Wewenang</p> <p>Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementator dimata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan.</p> <p>d) Fasilitas</p> <p>Fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.</p> <p>3) Disposisi</p> <p>Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi, adalah:</p> <p>a) Pengangkatan birokrat</p> <p>Disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi.</p> <p>b) Insentif</p> <p>Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendukung yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik.</p>	<p>4) Struktur birokrasi</p> <p>Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. Dua karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi ke arah yang lebih baik, adalah melakukan Standar Operating Procedur (SOP) dan melaksanakan fragmentasi.</p> <p>a) SOP</p> <p>SOP adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada setiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan.</p> <p>b) Fragmentasi</p> <p>Fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai di antara beberapa unit kerja⁴.</p> <p>Sistem Informasi Akademik</p> <p>Certo & Certo mendefinisikan sistem informasi "... is a network of applications established within an organization to provide managers with information that will assist them in the decision making"⁵. Ada empat proses yang dilakukan dalam membuat sistem informasi di lembaga, yaitu: perencanaan sistem informasi, mendesain sistem informasi, menyelenggarakan sistem informasi serta</p> <hr/> <p>4 Leo Agustino, <i>Dasar-dasar Kebijakan Publik</i> (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 149-154</p> <p>5 S.C Certo & S.T Certo, <i>Modern Management 10th edition, International Edition</i> (Singapore: Pearson Prentice Hall, 2006), hlm. 538</p>
--	---

meningkatkan sistem informasi⁶.
 Sistem Informasi Akademik (SIA) dihimpun dari berbagai macam data yang dikelola dan diproses se-otomatis mungkin dengan alat dan metoda sehingga menghasilkan informasi yang diperlukan bagi terlaksananya kegiatan akademis. Sistem ini dibagi ke dalam beberapa subsistem, yaitu: a) seleksi dan registrasi mahasiswa baru; b) kurikulum dan bidang studi; c) perkuliahan, tugas, ujian; d) pengelolaan dan pengembangan dosen; e) kelulusan, wisuda, alumni.

Analisis SWOT

Menurut Rangkuti:
 Analisis SWOT adalah suatu proses kreatif dalam merencanakan strategi, kebijakan dan program- program kerja suatu organisasi, atau unit organisasi dengan memperhatikan situasi dan kondisi lingkungan internal dan eksternal organisasi tersebut, baik pada sisi positif maupun negatifnya. Dengan kata lain SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan, dengan cara memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun pada saat bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman⁷.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Operasionalisasi konsep penelitian ini menggunakan teori Implementasi

Kebijakan Edwards III dengan dimensi antara lain: komunikasi, sumber daya, disposisi, serta struktur birokrasi. Sumber data berupa *person, place* dan *paper*. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan telaah dokumen. Informan penelitian ini adalah Civitas Akademika beserta Praja IPDN. Teknik analisis data terkait strategi menggunakan Analisis SWOT.

PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan SIAKAD Pada Biro Akademik IPDN

► **Komunikasi**

a) Transmisi
 Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dapat diketahui bahwa dari indikator transmisi (berupa penyaluran komunikasi yang baik), SIAKAD telah di sosialisasikan secara intens dan konsisten melalui beberapa cara, yakni melalui pertemuan, benner, *flying* ataupun dibuat di dalam suatu ruangan tertentu. Hal tersebut sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala Biro Administrasi Akademik, Perencanaan dan Kerja sama yang menyatakan bahwa, “proses penyampaian informasi mengenai SIAKAD sudah dilakukan melalui pertemuan-pertemuan, benner, *flying*, serta dibuat di dalam ruangan tertentu. Sosialisasinya juga sudah dilakukan secara intens dan konsisten”⁸.

6 *Ibid.*, hlm. 539
 7 Freddy Rangkuti, *Teknik Membedah Kasus Analisis SWOT* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm.6

8 Hasil wawancara penulis dengan Kepala Biro Administrasi Akademik, perencanaan dan kerja sama di Kampus IPDN Jatinangor pada 14 September 2017 Pukul 16.04 WIB

<p>Pernyataan Kepala Biro I tersebut juga diperkuat oleh salah satu staf Uptik Nina Karina yang menyatakan bahwa, “sosialisasi sudah dilakukan secara konsisten, dimana dari tahun 2012-2016 selalu diberikan pelatihan di Uptik minimal 1 tahun sekali. Tapi pada 2017 belum dilaksanakan sosialisasi dikarenakan pergantian pimpinan Uptik sehingga terdapat perbedaan kebijakan lagi⁹.</p> <p>Berdasarkan hasil pengumpulan data yang dilakukan penulis dapat diketahui bahwa sosialisasi mengenai kebijakan SIAKAD sudah dilakukan secara intens dan konsisten minimal satu kali dalam setahun. Namun sosialisasi yang dilakukan melalui pertemuan dan pada suatu ruangan tertentu hanya untuk admin yang ditunjuk berdasarkan SK Rektor serta unit yang berhubungan sebagai pelaksana SIAKAD. Sedangkan untuk Dosen maupun civitas akademika secara keseluruhan belum pernah dilakukan. Begitu pula dengan Praja sebagai peserta didik, sosialisasi yang dilakukan secara langsung kepada mereka baru dilaksanakan satu kali dari tanggal 1-4 Februari tahun 2016 lalu. Sehingga sampai saat ini Dosen maupun Praja belum menggunakan SIAKAD sebagai media dalam mempermudah proses pendidikan dan belajar mengajar, termasuk halnya dalam proses penyampaian maupun penerimaan nilai.</p> <p>b) Kejelasan</p> <p>Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada</p>	<p>Rektor IPDN Bapak Prof. Dr. Drs. Ermaya Suradinata, SH, MH, MS, dapat diketahui bahwa, “mengenai sosialisasi peraturan SIAKAD, silahkan tanyakan kepada Purek 1 dan Karo 1”¹⁰. Sehingga penulis menarik simpulan bahwa terkait sosialisasi peraturan mengenai Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di IPDN khususnya SIAKAD, Rektor selaku pembuat peraturan menyerahkan sepenuhnya tugas tersebut kepada jajaran Purek 1 dan Biro 1.</p> <p>Lebih lanjut ketika penulis mewawancarai admin penginput nilai SIAKAD, jawaban yang mereka berikan hampir sama sebagaimana berikut, ”dari awal kami diberi tugas sebagai admin penginput nilai, belum pernah kami disosialisasikan soal Peraturan mengenai Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di IPDN khususnya SIAKAD. Yang kami tahu kalau kami punya tugas untuk memasukkan nilai ke dalam SIAKAD saja”¹¹.</p> <p>Sehingga penulis beranggapan bahwa selama ini belum ada sosialisasi Peraturan mengenai Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di IPDN, yang salah satunya adalah SIAKAD. Selama ini sosialisasi yang dilakukan hanya sebatas pada bagaimana cara admin atau unit-unit terkait untuk menginput data-data ke dalam SIAKAD. Sehingga</p>
<p>⁹ Hasil wawancara penulis dengan salah satu staf UPTIK Nina Karina di Kampus IPDN Jatinangor pada 14 September 2017 Pukul 11.16 WIB</p>	<p>¹⁰ Hasil wawancara penulis dengan Rektor IPDN di Kampus IPDN Jatinangor pada 15 September 2017 Pukul 11.49 WIB</p> <p>¹¹ Hasil wawancara penulis dengan ketiga orang admin penginput nilai di Kampus IPDN Jatinangor pada 15 September 2017 Pukul 10.47 WIB</p>

petunjuk yang diberikan hanya terkait bagaimana cara mengoperasikan SIAKAD tersebut. Sedangkan mengenai peraturan maupun tujuan dari peraturan tersebut dibuat sama sekali belum ada sosialisasinya.

c) Konsistensi

Berdasarkan hasil wawancara, dapat diketahui bahwa respons/partisipasi pelaksana terhadap SIAKAD sudah cukup baik dengan terinputnya data-data ke dalam SIAKAD. Hal tersebut sebagaimana pernyataan Kepala Biro administrasi akademik, perencanaan dan kerja sama Bapak Dr. Yusharto Huntoyungo, M.Pd yang menyatakan bahwa, “pelaksana sudah cukup paham. Tapi tiba-tiba dipindah oleh kepegawaian sehingga harus sosialisasi ulang. Responnya juga sudah bagus, dimana ketika diperintah input data langsung selesai semua”¹². Namun mengenai pemahaman terhadap kebijakannya, hingga saat ini hampir seluruh admin mengaku belum terlalu paham. Yang mereka pahami adalah bagaimana menggunakan aplikasi SIAKAD dan tugas mereka dalam menginput data di SIAKAD.

► **Sumber Daya**

a) Staf

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, dapat diketahui bahwa dari indikator staf sebagai pelaksana kebijakan SIAKAD, sudah cukup memadai, namun belum optimal. Hal ini didukung pernyataan Kepala Biro

administrasi akademik, perencanaan dan kerja sama Bapak Dr. Yusharto Huntoyungo, M.Pd yang menyatakan bahwa, “kualitas dan kuantitas SDM pelaksana kebijakan kita 70% sudah bagus. Begitu pula kompetensi, keahlian serta keterampilan mereka, juga sudah bagus. Namun yang jadi permasalahan adalah ketika adminnya sudah bagus terus dipindah oleh kepegawaian ke bagian lain, sehingga kita mesti mulai dari awal lagi untuk membina admin baru”¹³.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, kualitas dan kuantitas SDM dinilai sudah bagus sebanyak 70%, sedangkan 30 % masih tergolong belum, sehingga dapat dikatakan belum optimal. Berdasar hasil pengamatan langsung dilapangan, SDM khususnya admin sudah memiliki jumlah yang cukup dan kualitas yang bagus. Namun berbeda halnya dengan SDM pengembangan aplikasi yang masih kurang kualitasnya. Hal tersebut dapat diketahui karena hingga saat ini IPDN masih memerlukan bantuan pihak ketiga untuk mengembangkan aplikasi SIAKAD nya. Hal ini semakin dipertegas oleh Purek 1 Bapak Prof. Dr. H. Khasan Effendy, M.Pd yang menyatakan bahwa, “salah satu permasalahan internal kita adalah tenaga terampil kita terbatas, SDM kita terbatas”¹⁴

12 Hasil wawancara penulis dengan Kepala Biro Administrasi Akademik, perencanaan dan kerja sama, *Loc.cit*

13 Hasil wawancara penulis dengan Kepala Biro Administrasi Akademik, perencanaan dan kerja sama, *Loc.cit*

14 Hasil Wawancara penulis dengan Pembantu Rektor 1 IPDN di Kampus IPDN Cilandak pada 26 Oktober 2017 Pukul 10.40 WIB

Tabel 1
Laporan Perkembangan Proses Input Data di SIAKAD Periode s.d. November 2015

NO	LOKASI KAMPUS	BAGIAN/UNIT KERJA	RINCIAN PEKEJAAN	STATUS DATA	KETERANGAN
1	Jatinangor	Fakultas MP	Data yang harus di input:		Admin sudah selesai menginput nilai 2014/2015 sampai Periode November
			Kelas Tahun ajar 2014/2015	Lengkap	
			Jadwal Pengajaran 2014/2015	Lengkap	
			Nilai Pengajaran 2014/2015	Lengkap	

Sumber: UPTIK 2015

Menurut informasi di atas dapat diketahui bahwa dari segi kualitas, kuantitas, keahlian, kompetensi serta keterampilan SDM pelaksana masih belum optimal dikarenakan masih kurangnya kualitas SDM pengembang aplikasi. Kemudian yang menjadi permasalahan lain adalah belum adanya admin khusus untuk mengelola SIAKAD. Dimana admin yang ada selama ini ditunjuk berdasarkan tempat dimana sumber data untuk di input dalam SIAKAD itu berada. Sehingga jika bagian Kepegawaian memindahkan pegawai ke bagian/unit lain, secara otomatis pegawai baru yang ditempatkan pada tempat dimana sumber data untuk di input dalam SIAKAD itu berada akan ditunjuk sebagai admin SIAKAD. Hal tersebut sebagaimana pernyataan Kepala Bagian Akademik Bapak Drs. Ujud Rusdia, M.Si, bahwa, “ketika pindah orang/organisasi, admin juga berganti. Staf kita jadinya merangkap admin. Tugasnya juga udah banyak, belum lagi tugas sebagai admin”¹⁵.

15 Hasil wawancara penulis dengan Kepala Bagian Akademik di Kampus IPDN Jatinangor pada 15 September 2017 Pukul 15.32 WIB

b) Informasi

Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Terkait informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan, sejauh ini sudah ada dan berlangsung minimal satu kali dalam setahun. Namun informasi yang diberikan hanya bagi admin dan unit/bagian yang berhubungan langsung dengan SIAKAD saja. Sehingga tidak semua civitas akademika yang mengetahuinya, termasuk dalam hal ini Dosen serta Praja selaku peserta didik. Sedangkan mengenai data kepatuhan dari pelaksana terhadap kebijakan SIAKAD dapat dilihat melalui banyaknya konten yang di isi, seperti lengkapnya nilai-nilai yang di input oleh admin yang dapat dilihat pada SIAKAD, karena pekerjaan yang dilakukan oleh admin sudah terekap langsung di dalam sistem. Hal tersebut diperkuat oleh salah

Tabel 2
Pembagian Wewenang Tugas dan Kewajiban Pelaksana SIAKAD

NO	NAMA JABATAN	TUGAS DAN KEWAJIBAN
1	Penanggung jawab	Bertanggung jawab atas semua kegiatan yang dilaksanakan oleh tim
2	Redaktur	Melakukan editing atau penyuntingan, yakni aktivitas penyeleksian dan perbaikan naskah yang akan dimuat atau dipublikasikan di website, SIAKAD dan PLO IPDN
3	Editor	Menerima, menyeleksi, mengedit, mempublikasikan dan menghapus artikel, gambar dan data lainnya
4	Admin	Membuat materi/isi, mendisain arsitektur, menerapkan aplikasi, dan membuat serta meng-update materi/isi dan tampilan website, melakukan pendampingan operator SIAKAD, dan mensosialisasikan pemanfaatan PLO di lingkungan kerja masing-masing
5	Web Developer	Merencanakan, merancang, mengelola, dan memelihara website, sistem informasi, SIAKAD dan PLO agar berjalan dengan baik

Sumber: Keputusan Rektor

satu admin UPTIK Bapak Endri yang menyebutkan bahwa, “data kepatuhan ada. Karena sistem juga ada. Kalau nilai lengkap, berarti admin patuh”¹⁶. Adapun contoh data kepatuhan dapat dilihat pada tabel laporan perkembangan proses input data di SIAKAD sebagaimana tampak pada tabel 1 di muka.

c) Wewenang

Wewenang harus bersifat formal agar perintah dapat dijalankan secara legal. Dalam kebijakan SIAKAD, wewenang yang dimiliki oleh pejabat berwenang sudah melekat sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Rektor maupun Peraturan Rektor yang mengaturnya. Dimana dalam Peraturan Rektor

maupun Surat Keputusan Rektor sudah tertera jabatan dan uraian tugas orang bersangkutan sebagaimana tabel 2 di atas.

d) Fasilitas

Fasilitas atau sarana prasarana merupakan sumber daya penunjang yang dapat memengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Dimana dalam mendukung pelaksanaan SIAKAD sudah digunakan berbagai sarana prasarana seperti komputer, server, data center, komputer anjungan, benner serta wifi. Namun yang sering menjadi kendala adalah jaringan yang tidak stabil serta masih sering terjadi error pada sistem. Hal tersebut sebagaimana yang dinyatakan oleh admin Penginput nilai serta staf UPTIK yakni, “untuk sarana prasarana sudah memadai.

16 Hasil wawancara penulis dengan salah satu Staf UPTIK IPDN Endry di Kampus IPDN Jatinangor pada 14 September 2017 Pukul 09.15 WIB

Tapi jaringannya masih lemot. Belum lagi kalau sistemnya tiba-tiba error, nginput datanya bisa jadi berulang-ulang¹⁷. Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian dilapangan penulis menyimpulkan bahwa sarana prasarana yang ada dari segi fisik sudah memadai, tapi terkendala dengan jaringan internet yang belum stabil sehingga sarana prasarana yang ada masih belum optimal.

► **Disposisi**

a) **Pengangkatan Birokrat**

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, proses rekrutmen admin pelaksana SIAKAD selama ini dilakukan bukan karena kemampuan, keahlian, kompetensi ataupun keterampilan yang bersangkutan. Namun dilakukan dengan melihat tempat dimana sumber data untuk di input itu berasal. Disamping itu, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan para Kaprodi dan Sekprodi di Fakultas Manajemen Pemerintahan dapat diketahui bahwa, “loyalitas, konsistensi, integritas dan komitmen dari admin dirasa masih belum optimal. Tugas si selesai, tapi kadang ketika ada perintah terlebih dahulu. Admin-admin ini seperti tidak memiliki semangat untuk menginput nilai. Kadang nilai langsung di input, kadang udah beberapa bulan baru di input¹⁸. Sehingga penulis mengambil simpulan bahwa loyalitas, konsistensi,

integritas dan komitmen dari admin masih belum optimal dikarenakan kurangnya motivasi yang dimiliki oleh admin sehingga lebih sering menunggu perintah terlebih dahulu baru menyelesaikan pekerjaannya.

b) **Insentif Aparatur**

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, admin SIAKAD mendapatkan insentif dalam melaksanakan tugasnya. Insentif yang didapat dibagikan tiap 6 bulan sekali dengan jumlah berkisar antara Rp 650.000,- sampai Rp 750.000,-. Dalam hal insentif, seluruh admin dengan beban kerja yang berbeda-beda tetap mendapatkan insentif yang sama. Hal ini menunjukkan telah terjadi ketidakadilan dalam pemberian insentif. Ditambah lagi admin yang juga malas atau belum menyelesaikan input datanya, namun tetap mendapatkan honor yang sama dengan admin lain yang sudah menyelesaikan tugasnya.

Insentif yang didapat oleh para admin juga dirasa masih kurang dibandingkan dengan beban kerja yang mereka emban. Berdasarkan hasil wawancara, semua informan dari segi pelaksana (admin penginput nilai dan staf UPTIK) mengatakan bahwa, “insentif masih kurang sekali. Masih belum sesuai dengan tugas yang kami emban. Ditambah kami juga punya pekerjaan lain sebagai staf di bagian/unit kami ditempatkan disamping sebagai admin SIAKAD¹⁹.

17 Hasil wawancara penulis dengan Admin Penginput Nilai dan Staf UPTIK IPDN di Kampus IPDN Jatinangor

18 Hasil wawancara penulis dengan Kaprodi dan Sekprodi di Fakultas Manajemen Pemerintahan Kampus IPDN Jatinangor

19 Hasil wawancara penulis dengan Admin Penginput Nilai dan Staf UPTIK IPDN, *Loc.cit*

Insentif yang diberikan sangat terbatas dipengaruhi oleh faktor anggaran yang juga terbatas. Hal ini diakui oleh Pembantu Rektor 1 Bapak Prof. Dr. H. Khasan Effendy, M.Pd yang menyatakan bahwa, “faktor eksternal yang menjadi salah satu penghambat SIAKAD ini adalah dukungan anggaran yang belum memadai”²⁰. Hal tersebut dipertegas lagi dengan pernyataan Kepala Bagian Akademik yang menyatakan bahwa, “aturan baku untuk insentif hingga saat ini belum ada. Oleh karena itulah insentifnya belum dianggarkan secara khusus”²¹.

► **Struktur Birokrasi**

a) Standar Operasional Prosedur (SOP)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis, dapat diketahui bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan SIAKAD, hingga saat ini belum ada yang dilegalkan. Diakui oleh salah satu staf UPTIK IPDN Ibu Nina Karina, “dulu kita sudah pernah membuat SOP. Tapi belum selesai SOP nya. Nah sekarang, pimpinan UPTIK juga sudah berganti. Aplikasi SIAKAD juga sudah di upgrade lagi sehingga banyak fitur dan konten yang berubah. Oleh karena itulah SOP nya mesti harus dibuat ulang lagi”.

b) Fragmentasi

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis, dapat diketahui bahwa koordinasi yang terjadi

antarbagian/unit terkait SIAKAD belum optimal. Koordinasi masih dilakukan secara manual dan sering kali sulit dilakukan. Disamping itu proses dari koordinasinya bisa berlangsung lama dan berulang-ulang. Hal tersebut diakui oleh beberapa pimpinan seperti Purek 1, Kepala Biro 1, Kabag Akademik, Kepala Uptik, Kaprodi dan Sekprodi yang penulis simpulkan bahwa, “koordinasi masih belum berlangsung. Ketika ada perlu baru koordinasi. Setelah koordinasi juga prosesnya bisa berlangsung lama untuk mendapatkan data”²².

Dukungan antarunit terkait, yakni Fakultas, pelatihan, kepegawaian, kepengasuhan, ekstrakurikuler, UPTIK serta perpustakaan dalam pelaksanaan SIAKAD juga belum optimal. Dimana ada bagian/unit yang mendukung juga ada yang sebaliknya. Sehingga menjadi salah satu penghambat dalam koordinasi yang dilakukan. Hal ini diakui oleh salah satu staf UPTIK Bapak Endri yang menyatakan bahwa, “antar unit terkait, sudah ada yang mendukung namun masih ada yang sebaliknya”²³.

Faktor yang Memengaruhi Implementasi Kebijakan Siakad

1. Aplikasi SIAKAD belum User Friendly

Hingga saat ini, SIAKAD belum mampu mendukung kelancaran

20 Hasil wawancara penulis dengan Pembantu Rektor 1 IPDN, *Loc.cit*

21 Hasil wawancara penulis dengan Kepala Bagian Akademik, *Loc.cit*

22 Hasil wawancara penulis dengan Purek 1, Kepala Biro 1, Kabag Akademik, Kepala Uptik, Kaprodi dan Sekprodi di Kampus IPDN Jatinangor.

23 Hasil wawancara penulis dengan salah satu Staf UPTIK IPDN Endry, *Loc.cit*

dan kesinambungan proses belajar mengajar serta optimalisasi integritas dan fleksibilitas dalam menghubungkan data akademik. Hal ini sebagaimana pernyataan salah satu Dosen di IPDN yakni Ibu Gatningsih yang mengungkapkan bahwa, “saya pernah buka aplikasi SIAKAD. Tapi untuk mendukung kegiatan belajar mengajar memang belum optimal”²⁴. Faktor utama yang memengaruhi implementasi kebijakan SIAKAD adalah aplikasinya sendiri. Dimana SIAKAD hanya sebagai tempat untuk menginput data secara manual dan tampilan di dalamnya masih bersifat monolog (satu arah) sehingga tidak memungkinkan para pengguna untuk melakukan komunikasi/hubungan timbal balik dua arah.

Lebih lanjut, konten yang dimiliki SIAKAD belum *friendly* dengan pengguna. Sehingga belum bisa menarik minat pengguna untuk menggunakan aplikasi tersebut dalam kegiatan sehari-hari. Hal ini sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Kepala Uptik IPDN Kampus Jatinangor, Bapak Dr. Agus Supriadi Harahap, M.Si, yang mana dapat diketahui bahwa:

Kebijakan yang ada sebetulnya sudah bagus. Tapi justru penghambatnya ada pada aplikasi SIAKAD nya sendiri. Aplikasi SIAKAD yang kita miliki masih memiliki beberapa kendala. Karena aplikasi SIAKAD yang ada

masih bersifat pangkalan data, yakni tempat berkumpulnya data-data dari yang kecil hanya untuk di input. Sehingga tampilannya masih bersifat monolog. Belum terintegrasi antarunit atau antara dosen dengan Praja karena masih bersifat 1 arah. Belum *user friendly* dan sesuai kebutuhan²⁵.

2. Data-data pada SIAKAD masih belum Up to-date dan terintegrasi

Data-data yang terdapat pada SIAKAD masih belum *up to-date* dan terintegrasi. Belum *up to-date* karena masih adanya perbedaan data antarunit. Belum terintegrasi dimana antarunit terkait belum dapat saling memperbaiki data, karena data hanya dapat di input dan diperbaiki oleh admin yang ditunjuk berdasarkan SK Rektor IPDN.

3. Sosialisasi belum diberikan kepada Seluruh Civitas Akademika

Sosialisasi secara langsung melalui pertemuan hanya dilakukan kepada admin dan unit terkait SIAKAD saja. Sedangkan kepada Praja baru berlangsung selama 1 kali, dan untuk Dosen belum pernah dilakukan sama sekali. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan 4 orang Praja yang menyatakan bahwa, “kami baru menerima sosialisasinya 1 kali. Itupun hanya tahun 2016 kemarin. Waktunya juga dilakukan malam hari, dalam waktu yang singkat dan kondisi yang ramai. Jadinya kurang efektif.

24 Hasil wawancara penulis dengan Dosen IPDN di Kampus IPDN Jatinangor pada 15 September 2017 Pukul 16.50 WIB.

25 Hasil wawancara penulis dengan Kepala UPTIK IPDN di Kampus IPDN Jatinangor pada 14 September 2017 Pukul 10.56 WIB

Kami hanya sekedar tahu ada aplikasi SIAKAD. Tapi sampai sekarang belum terlalu paham gunanya untuk apa”²⁶.

4. Sumber daya belum memadai

Sumber daya terdiri dari sumber daya manusia serta sumber daya lainnya seperti anggaran serta sarana prasarana. Terkait sumber daya manusia, kendala yang terjadi adalah pada kualitas tenaga pengembangan aplikasi SIAKAD yang masih kurang. Disamping itu, belum adanya admin tetap khusus untuk SIAKAD.

Terkait sumber daya lainnya, yakni dari sisi anggaran, dapat diketahui bahwa insentif yang dirasakan oleh admin masih kurang. Para admin merasa insentif yang diterima belum sesuai dengan beban tugas yang mereka kerjakan. Kemudian jika dilihat dari sisi sarana prasarana, masih sering terjadinya *error system* pada SIAKAD serta jaringan internet yang belum stabil. Hal tersebut dapat diketahui karena sering terjadinya eror pada sistem ketika proses input dilakukan serta jaringan internet yang sering terganggu dalam penggunaan sehari-hari.

5. Kurangnya koordinasi dan Kerja sama antarunit terkait SIAKAD

Koordinasi yang terjadi antarbagian/unit terkait SIAKAD masih kurang. Hal ini dikarenakan koordinasinya masih dilakukan secara manual dan sering kali sulit dilakukan. Disamping itu proses dari koordinasinya bisa berlangsung lama dan berulang-ulang.

26 Hasil wawancara penulis dengan 4 orang Praja IPDN di Kampus IPDN Jatinangor pada 15 September 2017

Hal tersebut diakui oleh beberapa pimpinan seperti Purek 1, Kepala Biro 1, Kabag Akademik, Kepala Uptik, Kaprodi dan Sekprodi yang penulis simpulkan bahwa,” koordinasi masih belum berlangsung. Ketika ada perlu baru koordinasi. Setelah koordinasi juga prosesnya bisa berlangsung lama untuk mendapatkan data”²⁷. Disamping itu, kerja sama antarunit terkait SIAKAD, yakni Fakultas, pelatihan, kepegawaian, kepengasuhan, ekstrakurikuler, UPTIK serta perpustakaan dalam pelaksanaan SIAKAD juga masih kurang. Dimana ada bagian/unit yang memang kerjasamanya sudah baik, namun juga ada yang sebaliknya.

Strategi yang Sebaiknya Dilakukan Oleh Biro Akademik IPDN

Strategi yang sebaiknya dilakukan oleh Biro Akademik Kampus IPDN Jatinangor dianalisis dengan menggunakan SWOT sehingga diperoleh faktor–faktor kekuatan, peluang, kelemahan dan ancaman sebagai berikut.

► **Kekuatan (Strenght)**

Faktor pendukung yang bersumber dari internal Biro Akademik merupakan kekuatan (*strengths*) yang dapat digunakan dalam rangka implementasi kebijakan SIAKAD, yakni:

- a. Adanya komitmen dan keinginan yang kuat dari Kepala Biro I dalam menerapkan kebijakan SIAKAD;

27 Hasil wawancara penulis dengan Purek 1, Kepala Biro 1, Kabag Akademik, Kepala Uptik, Kaprodi dan Sekprodi di Kampus IPDN Jatinangor

<p>b. Tersedianya sarana dan prasarana yang sudah cukup memadai seperti komputer, server, data center, komputer anjungan serta benner;</p> <p>c. Kemampuan dan integritas SDM pelaksana kebijakan 70% sudah bagus.</p> <p>► Kelemahan (<i>Weakness</i>)</p> <p>Selain faktor internal berupa kekuatan, faktor internal lain dapat menghambat implementasi suatu kebijakan, yakni:</p> <p>a. Aplikasi SIAKAD belum <i>User Friendly</i>;</p> <p>b. Data-data pada SIAKAD masih belum <i>Up to-date</i> dan terintegrasi;</p> <p>c. Kurangnya pendanaan (insentif admin belum sesuai dengan beban kerja yang diemban);</p> <p>d. SOP dalam pelaksanaan SIAKAD belum ada yang dilegalkan;</p> <p>e. Kurangnya kualitas tenaga pengembangan aplikasi SIAKAD;</p> <p>f. Belum adanya admin tetap khusus untuk mengelola SIAKAD;</p> <p>g. Masih terjadi gangguan jaringan (teknis) dan belum tersedianya jaminan keamanan data online dalam aplikasi SIAKAD;</p> <p>h. Sosialisasi belum diberikan kepada seluruh Civitas Akademika.</p> <p>► Peluang (<i>Opportunity</i>)</p> <p>Faktor eksternal berupa peluang yang dapat mendukung implementasi kebijakan SIAKAD adalah sebagai berikut.</p> <p>a. Keinginan Kepala UPTIK (Unit Pelayanan Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk mendukung Kepala Biro I dalam mengembangkan aplikasi SIAKAD;</p>	<p>b. Adanya kerja sama dengan pihak eksternal IPDN (Universitas Padjajaran) dalam pengembangan pelayanan pendidikan berbasis teknologi atau elektrolit;</p> <p>c. Adanya dukungan pihak eksternal (tenaga ahli IT Universitas Padjajaran) dalam pengembangan Aplikasi SIAKAD.</p> <p>► Ancaman (<i>Threat</i>)</p> <p>Faktor eksternal yang dapat menghambat/mengancam implementasi kebijakan SIAKAD adalah sebagai berikut.</p> <p>a. Adanya ancaman oleh peretas sistem aplikasi (<i>hacker</i>) yang tidak bertanggung jawab dan dapat merusak serta mengganggu aplikasi SIAKAD;</p> <p>b. Kurangnya partisipasi Civitas Akademika IPDN dalam mendukung penerapan pelayanan pendidikan berbasis teknologi;</p> <p>c. Terjadinya pergantian pimpinan yang berimplikasi pada kekhawatiran pelaksana terkait keberlanjutan penerapan SIAKAD di Kampus IPDN Jatinangor;</p> <p>d. Adanya keberagaman dari tingkat kemampuan Civitas Akademika IPDN dalam mengoperasikan internet.</p> <p>Berdasarkan hasil identifikasi berbagai faktor internal dan faktor eksternal implementasi kebijakan SIAKAD dalam meningkatkan pelayanan pendidikan pada Biro Akademik Kampus IPDN Jatinangor, maka matriks SWOT akan penulis uraikan sebagaimana tabel 3 berikut ini:</p>
---	---

<p>Berdasarkan identifikasi faktor-faktor internal dan eksternal di atas, maka diketahui 8 (delapan) isu strategis yang dapat digunakan untuk implementasi kebijakan SIAKAD dalam meningkatkan pelayanan pendidikan pada Biro Akademik Kampus IPDN Jatinangor. Strategi tersebut antara lain sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan komitmen pimpinan dalam menerapkan kebijakan SIAKAD Hal tersebut dapat dilakukan dengan kegiatan seperti berikut. (1) Legalitas payung hukum; (2) Prioritas anggaran yang cukup terkait peningkatan kapasitas ASN, infrastruktur, pengembangan, pemeliharaan dan sosialisasi SIAKAD. 2. Mengoptimalkan fungsi pegawai yang ada untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing dalam penerapan kebijakan SIAKAD 3. Membuat pemetaan rencana kebutuhan infrastruktur dalam pengembangan aplikasi SIAKAD Hal tersebut dilakukan guna menambah kekurangan infrastruktur dalam pengembangan aplikasi SIAKAD menjadi aplikasi yang <i>user friendly</i> (aplikasi di <i>upgrade</i> ulang dengan konten dan fitur-fitur yang lebih sederhana), terutama dengan menambah kapasitas dan kecepatan fasilitas penunjang berupa hardware dan software. 4. Membuat analisis kebutuhan pegawai pelaksana kebijakan SIAKAD dan menempatkan pegawai yang ahli di bidang IT Hal tersebut dilakukan agar terdapat pegawai khusus sebagai pelaksana 	<p>kebijakan SIAKAD. Dimana dalam proses rekrutmennya bukan lagi berdasar pada tempat dimana sumber data SIAKAD itu berasal, melainkan karena kompetensi aparatur tersebut, terutama aparatur yang ahli di bidang IT, sehingga aparatur tersebut bisa secara terus menerus ditempatkan dalam mengelola dan mengembangkan SIAKAD.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Meningkatkan pemberian kompensasi yang layak kepada pelaksana kebijakan SIAKAD Hal tersebut dapat dilakukan dengan kegiatan seperti berikut. (1) menambah insentif pelaksana kebijakan SIAKAD sesuai tupoksi masing-masing; (2) Diterapkannya sistem pemberian <i>reward and punishment</i> dalam mendukung pelaksanaan tugas yang baik. 6. Meningkatkan kompetensi pegawai pelaksana kebijakan SIAKAD Dapat dilakukan dengan kegiatan seperti berikut. (1) Mengikutsertakan pegawai yang tidak memiliki latar belakang IT ke dalam Diklat IT; (2) Memberikan pendidikan dan pelatihan IT secara reguler dan terus-menerus serta pendampingan dari pihak eksternal kepada pelaksana terkait keamanan informasi SIAKAD serta kepada tenaga pengembangan aplikasi SIAKAD. 7. Melakukan peningkatan pemanfaatan layanan SIAKAD Hal tersebut dapat dilakukan dengan kegiatan seperti berikut. (1) Mengembangkan aplikasi SIAKAD menjadi aplikasi yang <i>User Friendly</i>; (2) Mengembangkan sistem keamanan pada aplikasi SIAKAD dengan
---	---

<p>pengkodefikasian berupa <i>barcode</i> atau semacamnya; (3) Melakukan survei kepuasan Civitas Akademika IPDN terhadap penggunaan dan pemanfaatan aplikasi SIAKAD; (4) Memberikan sosialisasi pemanfaatan aplikasi SIAKAD secara reguler dan terus-menerus kepada Civitas Akademika IPDN dan lebih mengedepankan sosialisasi di ruang-ruang publik; (5) Memberikan edukasi kepada Civitas Akademika IPDN terkait penggunaan dan pemanfaatan aplikasi <i>online</i> dengan melibatkan bantuan pihak eksternal.</p> <p>8. Membuat Peraturan khusus tentang SIAKAD di IPDN</p> <p>Hal tersebut dapat dilakukan dengan kegiatan seperti berikut. (1) Membuat Peraturan Rektor tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan SIAKAD di IPDN; (2) Membuat SOP tentang Keamanan Informasi SIAKAD dalam rangka menjaga keamanan data; (3) Melegalkan SOP tentang Penggunaan SIAKAD.</p> <p>SIMPULAN DAN SARAN</p> <p>Simpulan</p> <p>Berdasarkan analisis yang telah dijelaskan, penulis menarik simpulan sebagai berikut.</p> <p>1. Implementasi kebijakan SIAKAD dalam meningkatkan pelayanan pendidikan pada Biro Akademik Kampus IPDN Jatinangor belum optimal. Hal tersebut dapat diketahui berdasarkan hasil observasi, telaah dokumen serta wawancara dengan menggunakan Teori Edwards III yang akan penulis uraikan sebagai berikut.</p>	<p>a. Dimensi Komunikasi, masih terdapat adanya informasi yang terdistorsi ditengah jalan sehingga informasi mengenai kebijakan SIAKAD ini tidak menyeluruh diterima oleh Civitas Akademika khususnya Dosen dan Praja.</p> <p>b. Dimensi Sumber daya, masih kurangnya kualitas tenaga pengembangan aplikasi SIAKAD serta sarana prasarana pendukung seperti jaringan yang belum stabil.</p> <p>c. Dimensi Disposisi, proses rekrutmen admin belum berdasarkan kemampuan/ keterampilan yang dimiliki serta kurangnya insentif yang diberikan sehingga admin kurang termotivasi.</p> <p>d. Dimensi Struktur birokrasi, masih belum ada SOP yang diterbitkan serta belum seluruh unit yang mendukung pelaksanaan SIAKAD sehingga mengakibatkan kurangnya koordinasi antarunit terkait.</p> <p>2. Faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan SIAKAD dalam meningkatkan pelayanan pendidikan pada Biro Akademik Kampus IPDN Jatinangor antara lain:</p> <p>a. Aplikasi SIAKAD belum <i>User Friendly</i>.</p> <p>b. Data-data pada SIAKAD masih belum <i>Up to-date</i> dan terintegrasi.</p> <p>c. Sosialisasi belum diberikan kepada Seluruh Civitas Akademika.</p> <p>d. Sumber daya belum memadai.</p> <p>e. Kurangnya koordinasi dan kerja sama antarunit terkait SIAKAD.</p>
--	---

<p>3. Strategi yang sebaiknya dilakukan oleh Biro Akademik Kampus IPDN Jatinangor dalam menerapkan kebijakan SIAKAD antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan komitmen pimpinan dalam menerapkan kebijakan SIAKAD; b. Mengoptimalkan fungsi pegawai yang ada untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing dalam penerapan kebijakan SIAKAD; c. Membuat pemetaan rencana kebutuhan infrastruktur dalam pengembangan aplikasi SIAKAD; d. Membuat analisis kebutuhan pegawai pelaksana kebijakan SIAKAD dan menempatkan pegawai yang ahli di bidang IT; e. Meningkatkan pemberian kompensasi yang layak kepada pelaksana kebijakan SIAKAD; f. Meningkatkan kompetensi pegawai pelaksana kebijakan SIAKAD; g. Melakukan peningkatan pemanfaatan layanan SIAKAD; h. Membuat Peraturan khusus tentang SIAKAD di IPDN. 	<p>IPDN khususnya SIAKAD, sehingga informasi yang ada tidak lagi terdistorsi di tengah jalan dan tujuan dari dibuatnya kebijakan tersebut dapat diketahui dan lebih mudah untuk di optimalkan.</p> <ol style="list-style-type: none"> b) Dimensi Sumber daya, perlu adanya peningkatan intensitas dan konsistensi dalam memberikan kegiatan pelatihan bagi tenaga pengembangan aplikasi SIAKAD serta menambah kekuatan jaringan agar stabil dan tidak sering eror pada sistem. c) Dimensi Disposisi, hendaknya rekrutmen admin SIAKAD bisa dilihat berdasarkan kemampuan/ keterampilan yang dimiliki, bukan berdasarkan tempat seseorang bertugas dimana sumber data berasal, sehingga bisa dimiliki admin khusus yang tugasnya menginput data serta meng-<i>upgrade</i> SIAKAD. Disamping itu, perlu adanya penambahan insentif bagi admin sehingga admin menjadi lebih termotivasi. d) Dimensi Struktur birokrasi, perlu adanya SOP yang diterbitkan dalam pelaksanaan SIAKAD, sehingga setiap orang maupun unit dapat mengetahui prosedur legal dari pelaksanaan SIAKAD. Dan pada akhirnya dapat saling mendukung serta koordinasi dapat berjalan lebih optimal.
<p>Saran</p> <p>Peneliti memiliki beberapa saran sebagai berikut.</p> <p>1. Segi Teoretis</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Dimensi Komunikasi, perlu adanya sosialisasi secara langsung bagi civitas akademika terutama Dosen dan Praja terkait kebijakan Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di 	<p>2. Segi Praktis</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Perlu adanya dukungan kebijakan agar aplikasi SIAKAD dapat menjadi suatu aplikasi yang multi <i>platform</i> sehingga menjadi sumber utama dalam penggunaan

<p>data akademik di IPDN.</p> <p>b) Perlu diberikan sistem <i>reward</i> dan <i>punishment</i> bagi admin yang berprestasi dan juga sebaliknya, sehingga ada motivasi lebih tinggi bagi admin dalam melaksanakan tugasnya serta ada efek jera bagi admin yang melalaikan tugasnya.</p> <p>c) Perlu adanya penambahan sarana prasarana seperti komputer anjungan, yang nantinya bisa digunakan untuk mengakses SIAKAD baik oleh Dosen, Praja maupun Civitas Akademika.</p> <p>DAFTAR PUSTAKA</p> <p>Agustino, Leo. 2008. <i>Dasar-dasar Kebijakan Publik</i>. Bandung: Alfabeta.</p> <p>Certo, S.C & Certo, S.T. 2006. <i>Modern Management 10th edition, International Edition</i>. Singapore: Pearson Prentice Hall.</p> <p>Kurniawan, Agung. 2005. <i>Transformasi Pelayanan Publik</i>. Yogyakarta: Pembaruan.</p>	<p>Rangkuti, Freddy. 2014. <i>Teknik Membedah Kasus Analisis SWOT</i>. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.</p> <p>Sinambela, L.P. <i>Ilmu dan Budaya, Perkembangan Ilmu Administrasi Negara</i>. Edisi Desember 1992.</p> <p>Peraturan Perundang-Undangan</p> <p>Keputusan Rektor IPDN Nomor 555.4-175 Tahun 2012 tentang Tim Pengelola Website, Sistem Informasi Akademik (SIAKAD), dan <i>Paperless Office</i> (PLO) IPDN Tahun 2012</p> <p>Peraturan Rektor IPDN Nomor 01 Tahun 2014 tentang Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan IPDN</p> <p>Evidensi Ilmiah</p> <p>Prabowo, Muhammad Reza. 2013. <i>Implementasi Kebijakan Penanganan Penyandang Disabilitas di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah</i>. Jakarta: IPDN.</p>
---	---